



Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Rasio Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, dan Pertumbuhan pada Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019–2024

Reni Isuntari

Program Studi Magister Manajemen, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Penulis Korespondensi: isuntarireni@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the level of regional financial independence and various financial ratios in assessing the performance of regency and city governments in the Special Region of Yogyakarta (DIY) for the 2019–2024 period. The method employed is a descriptive qualitative approach supported by quantitative data in the form of Budget Realization Reports (LRA). Performance measurement was conducted through several key indicators, including independence, effectiveness, efficiency, and growth ratios. The results indicate that the level of fiscal independence remains relatively low, characterized by a high dependency on transfer funds from the central government. On the other hand, the effectiveness ratio shows good achievement, as most regions were able to meet their revenue targets, particularly from Local Own-Source Revenue (PAD). However, the efficiency of expenditure management remains uneven across regions. Furthermore, the revenue growth ratio shows fluctuations influenced by economic conditions, including the impact of the pandemic. Overall, regional financial performance still needs to be improved, especially in strengthening fiscal independence and optimizing PAD potential.*

Keywords: *Effectiveness; Efficiency; Fiscal Independence; Local Own-Source Revenue (PAD); Regional Financial Performance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tingkat kemandirian keuangan daerah serta berbagai rasio keuangan dalam menilai kinerja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Pengukuran kinerja dilakukan melalui beberapa indikator utama, meliputi rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian *fiskal* masih relatif rendah yang ditandai dengan tingginya ketergantungan terhadap dana *transfer* dari pemerintah pusat. Di sisi lain, rasio efektivitas menunjukkan capaian yang baik karena sebagian besar daerah mampu memenuhi target pendapatan, khususnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, efisiensi pengelolaan belanja masih belum merata antar daerah. Selain itu, rasio pertumbuhan pendapatan memperlihatkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, termasuk dampak pandemi. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memperkuat kemandirian *fiskal* dan mengoptimalkan potensi PAD.

Kata kunci: Efektivitas ; Efisiensi; Kemandirian *Fiskal*; Kinerja Keuangan Daerah; PAD.

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh aktivitas perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama. APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi indikator kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Kemampuan keuangan daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dimiliki, melainkan dari efektivitas pengelolannya. Dalam hal ini, analisis rasio keuangan menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah.

Melalui perbandingan antar komponen dalam laporan keuangan, analisis ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi *fiskal* suatu daerah.

Pengukuran kinerja keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dapat menunjukkan sejauh mana pengelolaan anggaran telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, transparansi dalam penggunaan keuangan publik dapat lebih terjamin.

Salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan adalah tingkat kemandirian *fiskal*. Daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi cenderung mampu memenuhi kebutuhan pembiayaannya secara mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Namun, pada kenyataannya banyak daerah di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana *transfer*.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis yang lebih mendalam untuk melihat perkembangan kinerja keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan yang bersumber dari APBD dan realisasinya selama periode 2019–2024. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan keuangan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencerminkan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang memiliki konsekuensi finansial, termasuk aset yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengelolaannya diwujudkan dalam APBD sebagai instrumen utama perencanaan dan pengendalian. Dalam praktiknya, pengelolaan tersebut harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi agar mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan selama periode tertentu. Penilaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui sejauh mana pengelolaan keuangan berjalan secara optimal.

Rasio Keuangan Daerah.

Analisis rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi keuangan pemerintah daerah melalui perbandingan antar komponen dalam APBD. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih terukur terkait kemampuan keuangan daerah.

Rasio Kemandirian

Rasio ini digunakan untuk menilai tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa daerah semakin mandiri dan tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, mulai dari ketergantungan tinggi hingga kondisi mandiri. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin besar pula keleluasaan daerah dalam mengelola kebijakan *fiskalnya*.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menunjukkan hubungan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Pengelolaan keuangan dikatakan efisien apabila penggunaan sumber daya mampu menghasilkan output yang optimal dengan biaya yang relatif minimal.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai target pendapatan. Apabila realisasi pendapatan mampu memenuhi atau bahkan melampaui target, maka kinerja tersebut dapat dikategorikan efektif.

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan menggambarkan perkembangan kinerja keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis ini penting untuk melihat tren peningkatan atau penurunan pendapatan daerah dalam jangka waktu tertentu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami kondisi kinerja keuangan daerah secara lebih mendalam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan data yang tersedia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2019–2024. Data tersebut dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari sumber resmi masing-masing pemerintah daerah.

Dalam proses analisis, data yang telah diperoleh terlebih dahulu disusun dan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya dilakukan perhitungan terhadap beberapa indikator rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan.

Hasil perhitungan kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan analisis deskriptif untuk menjelaskan makna dari hasil perhitungan tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kinerja keuangan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan pada seluruh kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2019–2024, terlihat adanya variasi tingkat kemandirian antar daerah. Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul masih berada pada kategori kemandirian instruktif (0–25%), yang mencerminkan bahwa kapasitas keuangan daerah masih relatif rendah. Dalam kondisi ini, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat melalui dana *transfer*. Akibatnya, ruang gerak daerah dalam menjalankan otonomi menjadi terbatas, dan arah kebijakan masih banyak dipengaruhi oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, Kabupaten Bantul berada pada kategori kemandirian konsultatif (25–50%), yang menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat mulai berkurang. Meskipun demikian, daerah masih memerlukan arahan dan dukungan, terutama dalam pengelolaan keuangan. Pada tahap ini, pemerintah daerah telah mulai mampu menjalankan sebagian fungsi otonomi, namun dalam pengambilan keputusan strategis masih memerlukan konsultasi dengan pemerintah pusat.

Di sisi lain, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori kemandirian partisipatif (50–75%). Hal ini menunjukkan bahwa kedua daerah tersebut telah memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya. Peran pemerintah pusat menjadi semakin kecil karena daerah dinilai sudah lebih mandiri dalam melaksanakan otonomi. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pada tahap ini cenderung bersifat kemitraan, di mana pemerintah pusat lebih berperan sebagai fasilitator.

Gambaran mengenai perbedaan tingkat kemandirian keuangan antar daerah tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

No	Nama Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah						Rata-Rata
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kabupaten Kulon Progo	16,58%	19,16%	23,22%	25,22%	23,62%	25,63%	22,24%
2	Kabupaten Bantul	28,69%	29,52%	28,19%	31,43%	32,12%	32,40%	30,39%
3	Kabupaten Sleman	52,02%	44,97%	40,39%	54,56%	57,85%	57,65%	51,24%
4	Kabupaten Gunung Kidul	13,71%	14,59%	14,04%	18,72%	16,17%	16,61%	15,64%
5	Kota Yogyakarta	64,00%	49,55%	53,93%	62,32%	67,36%	69,72%	61,15%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2026

Rasio Efisiensi PAD

Berdasarkan rata-rata hasil analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat bahwa tingkat efisiensi belanja daerah masih belum menunjukkan kondisi yang optimal. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul tercatat berada pada kategori tidak efisien (di atas 100%), yang berarti realisasi belanja melampaui kemampuan pendapatan yang dimiliki.

Sementara itu, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta berada pada kategori kurang efisien (90%–100%), yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah masih belum sepenuhnya optimal meskipun relatif lebih baik dibandingkan dua daerah sebelumnya.

Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mengendalikan belanja agar lebih seimbang dengan pendapatan. Ilustrasi mengenai kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rasio Efisiensi PAD

No	Nama Daerah	Rasio Efisiensi PAD						Rata-Rata
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kabupaten Kulon Progo	89,42%	94,79%	92,04%	100,06%	99,93%	101,34%	96,26%
2	Kabupaten Bantul	100,62%	99,49%	99,59%	100,53%	99,81%	100,25%	100,05%
3	Kabupaten Sleman	97,76%	99,65%	97,17%	101,15%	100,94%	101,53%	99,70%
4	Kabupaten Gunung Kidul	100,91%	99,03%	99,92%	100,89%	100,44%	98,96%	100,02%
5	Kota Yogyakarta	98,23%	89,28%	99,10%	96,66%	98,57%	100,47%	97,05%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2026

Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan rata-rata hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh daerah menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi, yang tercermin dari persentase di atas 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan bahkan melampaui target PAD yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kinerja pengelolaan pendapatan daerah dapat dinilai sudah berjalan dengan baik dan efektif. Gambaran lebih lanjut mengenai kondisi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 2. Rasio Efektivitas PAD

No	Nama Daerah	Rasio Efektivitas PAD						Rata-Rata
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kabupaten Kulon Progo	102,80 %	116,95 %	124,56 %	116,17 %	105,06 %	101,85 %	111,23%
2	Kabupaten Bantul	108,30 %	113,98 %	110,85 %	103,79 %	108,93 %	103,23 %	108,18%
3	Kabupaten Sleman	107,61 %	116,48 %	104,28 %	102,90 %	103,79 %	98,71 %	105,63%
4	Kabupaten Gunung Kidul	110,14 %	104,37 %	101,95 %	111,79 %	103,77 %	103,53 %	105,92%
5	Kota Yogyakarta	105,52 %	118,09 %	116,14 %	114,41 %	115,83 %	109,48 %	113,24%

Sumber: Data Sekunder diolah, 2026

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Pertumbuhan pendapatan pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun 2019, 2021, 2022, dan 2024. Namun demikian, kenaikan pendapatan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2022 relatif tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020, hampir seluruh daerah mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan, kecuali Kabupaten Kulon Progo yang masih mampu mempertahankan pertumbuhan positif. Kondisi penurunan tersebut mencerminkan dampak pandemi yang sempat menekan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Selanjutnya, penurunan pertumbuhan pendapatan kembali terjadi pada tahun 2023, terutama di Kabupaten Gunungkidul. Gambaran lebih rinci mengenai rasio pertumbuhan pendapatan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

No	Nama Daerah	Rasio Pertumbuhan Pendapatan						Rata-Rata
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kabupaten Kulon Progo	0,13	0,07	0,21	0,00	0,05	0,11	0,09
2	Kabupaten Bantul	0,09	0,05	0,03	0,10	0,09	0,09	0,06
3	Kabupaten Sleman	0,09	0,19	0,02	0,32	0,07	0,05	0,06
4	Kabupaten Gunung Kidul	0,12	0,10	0,04	0,33	0,12	0,09	0,06
5	Kota Yogyakarta	0,03	0,18	0,06	0,21	0,11	0,06	0,05

Sumber: Data Sekunder diolah, 2026.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2019–2024 masih bervariasi dan belum sepenuhnya optimal. Tingkat kemandirian keuangan daerah umumnya masih rendah, ditandai dengan tingginya ketergantungan pada dana *transfer* pemerintah pusat, meskipun beberapa daerah seperti Sleman dan Kota Yogyakarta telah menunjukkan tingkat kemandirian yang lebih baik. Dari sisi efisiensi, pengelolaan belanja daerah belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat daerah dengan realisasi belanja yang relatif tinggi dibandingkan pendapatannya. Namun demikian, rasio efektivitas menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana seluruh daerah mampu mencapai bahkan melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, rasio pertumbuhan pendapatan cenderung fluktuatif akibat pengaruh kondisi ekonomi, khususnya pada masa pandemi.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian *fiskal* melalui optimalisasi PAD serta memperbaiki efisiensi belanja agar lebih tepat sasaran. Selain itu, diperlukan strategi yang adaptif dalam menjaga stabilitas pertumbuhan pendapatan guna mendukung keberlanjutan kinerja keuangan daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, N. (2015). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah. *Iqtishaduna*.
- Assegaf, Z. H., Ahyaruddin, M., & Marlina, E. (2025). Analisis kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja ditinjau dari rasio keuangan Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(1), 48–60.

- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisis rasio kemandirian daerah dan rasio keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Akurasi: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 95–102.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul. (2019–2024). *Laporan realisasi APBD Kabupaten Gunungkidul*. <https://bkad.gunungkidulkab.go.id>
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. (2019–2024). *Laporan realisasi APBD Kabupaten Kulon Progo*. <https://bkad.kulonprogokab.go.id>
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. (2019–2024). *Laporan realisasi APBD Kabupaten Sleman*. <https://bkad.slemankab.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan hasil reviu kemandirian fiskal pemerintah daerah tahun 2020*.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. (2019–2024). *Laporan realisasi APBD Kota Yogyakarta*. <https://bpkad.jogjakota.go.id>
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. (2019–2024). *Laporan realisasi APBD Kabupaten Bantul*. <https://bpkpad.bantulkab.go.id>
- Cheryll, B. A., Kumenaung, A. G., & Kawung, G. M. V. (2025). Analisis rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan keserasian untuk penilaian kinerja keuangan daerah.
- Faradilla, S., & Hanifa, N. (2024). Analisis rasio efektivitas PAD, efisiensi PAD, dan kemandirian Kota Surabaya. *Independent: Journal of Economics*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hunter, J. (1977). *Fiscal autonomy and local government finance*. Academic Press.
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Semarang sebelum dan saat pandemi Covid-19. *Expansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 14(2), 146–166.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)*.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nasution, S. N. F., Syahrani, A., Astari, P., JS, G. A., Marbun, N., & Febyani, V. (2025). Analysis of independence ratio, effectiveness ratio and growth ratio in assessing the financial performance of Bandung City Government. *EDUCTUM: Journal Research*, 4(6), 226–234.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Roychana, H. (2022). Analisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2016–2020. *Jurnal Riset Daerah*, XXII(4), 4321–4334.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.